



Evaluasi Tingkat Indikasi Kekumuhan Yang Ada di Kelurahan Loa Ipuh Kabupaten Kutai Kartanegara

Kezia Hesed Julinda Rahadi ^{1,*}, Devi Triwidya Sitaresmi ¹, Mega Ulimaz ¹, Ajeng Nugrahaning Dewanti ¹

¹Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan.

*Corresponding author : rahadikezia@gmail.com

Diterima 31 Maret 2024 | Disetujui 15 April 2024 | Diterbitkan 14 Juni 2024

Abstrak

Pertambahan penduduk mempengaruhi kebutuhan akan tempat tinggal tidak sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada dan berpotensi menimbulkan kawasan kumuh baru. Kawasan paling memungkinkan untuk menjadi kawasan kumuh di Kecamatan Tenggarong yaitu Kelurahan Loa Ipuh yang didasari oleh tingginya jumlah penduduk, terdapat bangunan yang berada di sempadan sungai dan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman kumuh. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi tingkat indikasi kekumuhan yang ada di Kelurahan Loa Ipuh, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian untuk melihat tingkat indikasi kekumuhan akan didapatkan dari segi perizinan, standar teknis dan kelaikan fungsi. Metode pengumpulan dilakukan secara primer maupun sekunder dengan menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Diketahui berdasarkan hasil analisis maka didapatkan tingkat indikasi kekumuhan pada lokasi studi yaitu kumuh ringan dengan total nilai pada RT 26 sebesar 26 dan pada RT 29 memiliki nilai sebesar 24.

Kata-kunci : Deskriptif Komparatif, Indikasi Kekumuhan, Loa Ipuh, Permukiman Kumuh, Standar Teknis

Evaluation of Slum Indicator Levels in Loa Ipuh Village, Kutai Kartanegara Regency

Abstract

Population growth affects the demand for housing, which does not align with the available land, potentially leading to the emergence of new slum areas. The area most likely to become a slum in Tenggarong District is Loa Ipuh Sub-district, based on the high population, buildings located along riverbanks, and direct borders with existing slum areas. Therefore, it is necessary to evaluate the level of slum indicators in Loa Ipuh Sub-district, Kutai Kartanegara Regency. To assess the level of slum indicators, the evaluation will consider aspects of permits, technical standards, and functional feasibility. Data collection was conducted both primarily and secondarily using a descriptive comparative analysis technique. Based on the analysis results, the level of slum indicators in the study area was found to be light slum with a total score of 26 in RT 26 and 24 in RT 29.

Keywords : Comparative Descriptive, Slum Indicators, Loa Ipuh, Slum Settlements, Technical Standards

A. Pendahuluan

Kecamatan Tenggarong merupakan ibukota dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (RTRW Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033). Kelurahan Loa Ipuh merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tenggarong dengan luas wilayah paling besar. Kelurahan Loa Ipuh termasuk dalam bagian kelurahan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.454/SK-BUP/HK/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Hal ini dapat terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan yang tidak terkendali (Wardhani dkk, 2018). Pada Kelurahan Loa Ipuh terdapat daerah permukiman kumuh dengan luasan sebesar 0,5225 Ha dengan status kumuh ringan. Apabila luas kawasan permukiman tidak lagi dapat mengakomodir kebutuhan kawasan permukiman penduduk akibat terbatasnya lahan maka kawasan akan menjadi semakin kumuh dan tidak teratur. Adanya peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas lainnya turut meningkatkan kebutuhan ruang, khususnya untuk kawasan perumahan dan permukiman (Sari et al, 2021).

Kelurahan Loa Ipuh memiliki penduduk terbanyak dan memiliki kepadatan penduduk sebesar 788,13 jiwa/km². Secara lebih lanjut dapat dilihat pada RT 26 dan RT 29 yang menunjukkan kepadatan sebesar 19.931,97 jiwa/km² dan 29.246,75 jiwa/km². Kawasan perumahan yang kumuh dianggap sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tidak memadainya fasilitas, kurang aman, kotor, tidak sesuai standar, dan tidak sehat (Rahardjo, dkk dalam Patrisia, 2017). Selain dengan penduduk yang cukup padat, RT 26 dan RT 29 juga terdapat 15 bangunan yang berada disempadan sungai serta dapat dilihat melalui kondisi bangunan yang mayoritas termasuk dalam kriteria bangunan semi permanen. Pada dasarnya bangunan semi permanen lebih rentan terhadap cuaca dan juga bangunan semi permanen sering kali dibangun tanpa adanya izin yang memadai. Kemudian untuk RT 26 dan RT 29 juga berada dekat dengan RT lain yang termasuk dalam kategori kumuh ringan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat berpotensi menjadi permukiman yang kumuh (Muvidayanti dan Sriyono, 2019). Sehingga diperlukannya mengevaluasi indikasi kekumuhan yang ada di Kelurahan Loa Ipuh, Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Metode

Riset yang dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan survei lapangan. Data yang akan dikumpulkan melalui sumber data yang berasal dari informasi langsung maupun tidak langsung, untuk informasi langsung atau dapat primer dapat dikumpulkan melalui survei lapangan atau observasi dan juga wawancara di lokasi penelitian yaitu pada RT 26 dan RT 29 di Kelurahan Loa Ipuh.

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan secara sekunder maupun primer, untuk yang sekunder dilakukan kunjungan ke lembaga yang terkait seperti Kantor Kelurahan Loa Ipuh dan Ketua RT 26 dan juga Ketua RT 29 guna memperoleh informasi yang diperlukan seperti data penduduk, karakteristik fisik pada lokasi dan hal yang berkaitan lainnya. Kemudian untuk mengetahui lebih jauh terkait data-data yang tidak didapatkan melalui lembaga terkait dan juga Ketua RT 26 dan Ketua RT 29 maka perlu dilakukannya survei secara primer yang langsung turun ke lapangan. Selain itu pengumpulan data secara primer juga dilakukan saat wawancara kepada masyarakat setempat.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk evaluasi tingkat indikasi kekumuhan yang ada di Kelurahan Loa Ipuh Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu analisis deskriptif komparatif dengan menentukan kesesuaian pada perizinan, standar teknis, serta kelaikan fungsinya yang selaras pada aturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menginput variabel yang dibutuhkan berlandaskan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas pada Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam mengevaluasi tingkat indikasi kekumuhan yaitu :

a) Pengambilan Data

Data yang dibutuhkan dalam analisis deskriptif komparatif yaitu diperoleh dengan cara melakukan survei sekunder dan survei primer agar mendapatkan jumlah ketersediaan dan kelayakan dari perizinan, standar

teknis dan kelaikan fungsi.

b) Pengolahan Data

Setelah didapatkan data yang diperlukan selanjutnya perlu dilakukan pengolahan data dengan cara melihat persentase variabel yang tidak sesuai, sehingga setelah didapatkan persentasenya kemudian dapat dilihat variabel tersebut termasuk dalam tingkat indikasi kekumuhan tinggi, sedang atau rendah, yang dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut :

Tabel 1. Parameter Tingkat Indikasi Kekumuhan

Indikator	Variabel	Tingkat Indikasi Kekumuhan		
		Tinggi 5	Sedang 3	Rendah 1
Perizinan	Izin lokasi	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Izin penggunaan pemanfaatan tanah	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	IMB (Izin mendirikan bangunan)	76%-100%	51%-75%	25%-50%
Standar Teknis	Bangunan gedung	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Jalan lingkungan	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Penyediaan air minum	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Drainase lingkungan	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Pengelolaan air limbah	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Persampahan	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Proteksi kebakaran	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Kelaikan Fungsi	Bangunan gedung	76%-100%	51%-75%
	Jalan lingkungan	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Penyediaan air minum	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Drainase lingkungan	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Pengelolaan air limbah	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Persampahan	76%-100%	51%-75%	25%-50%
	Proteksi kebakaran	76%-100%	51%-75%	25%-50%

Sumber : Permen PUPR 14 Tahun 2018

Kemudian akan dilakukan pembobotan atau skoring berdasarkan :

- Nilai 0 : 0-24 persen (%)
- Nilai 1 : 25-50 persen (%)
- Nilai 3 : 51-75 persen (%)
- Nilai 5 : 76-100 persen (%)

Dengan kategori tingkat kekumuhan sebagai berikut :

- Kumuh ringan : 19-44
- Kumuh sedang : 45-70
- Kumuh berat : 71-95

Kemudian setelah dilakukan skoring selanjutnya akan diketahui tingkat kekumuhan pada RT 26 dan RT 29 Kelurahan Loa Ipuh.

C. Hasil dan Pembahasan

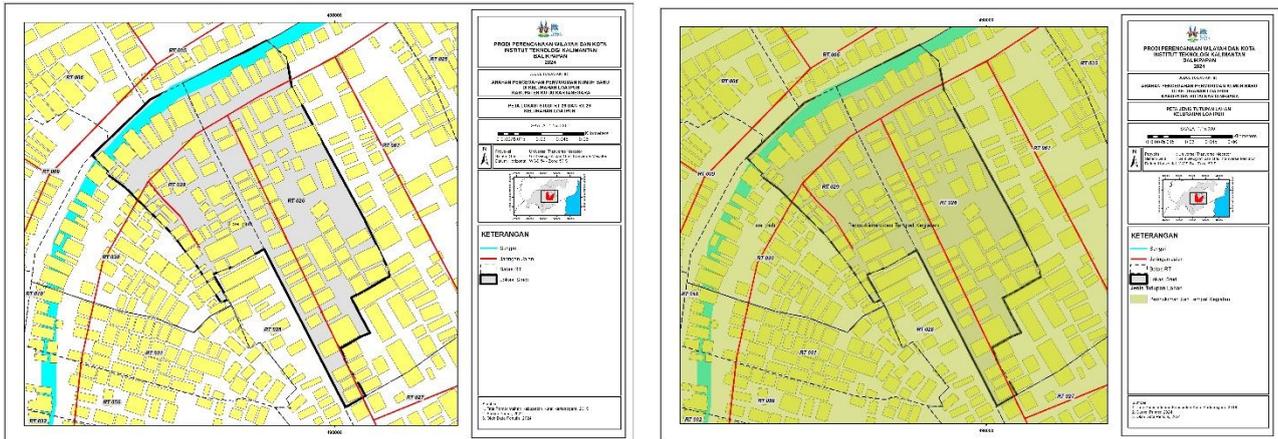
1. Gambaran Umum Wilayah

Kelurahan Loa Ipuh yang merupakan bagian dari Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah paling besar diantara semua kelurahan yang ada, yaitu dengan luas sebesar 2.286 Ha atau 22,86 Km². Kelurahan Loa Ipuh memiliki batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Maluhu, Kelurahan Mangkurawang dan Kelurahan Panji
- Sebelah Selatan : Kelurahan Jahab
- Sebelah Timur : Kelurahan Melayu dan Kelurahan Timbau
- Sebelah Barat : Kelurahan Loa Ipuh Darat

Kelurahan Loa Ipuh terdiri dari 77 RT yang kemudian akan lebih difokuskan pada 2 RT yaitu RT 26 dan RT 29 yang berada diantara kawasan yang terdeliniasi kumuh pada Kelurahan Loa Ipuh. RT 26 memiliki luas wilayah sebesar 0,0147 Km² atau 1,47 Ha dan pada RT 29 memiliki luas wilayah sebesar 0,0077 Km² atau 0,77 Ha. Berikut merupakan peta lokasi studi yang berada di RT 26 dan RT 29 dan bisa dilihat pada **Gambar 1a**.

Tutupan lahan merupakan wujud fisik yang ada di permukaan bumi baik yang terbentuk karena buatan manusia ataupun terbentuk secara alamiah. Tutupan lahan yang terdapat pada RT 26 dan RT 29 di Kelurahan Loa Ipuh yaitu memiliki fungsi sebagai permukiman dan juga tempat kegiatan yang bisa dilihat pada **Gambar 1b**.



Gambar 1a. Peta Lokasi Studi RT 26 dan RT 29

Gambar 1b. Peta Tutupan Lahan RT 26 dan RT 29

2. Hasil Analisis Evaluasi Indikasi Kekumuhan yang Ada di Kelurahan Loa Ipuh, Kabupaten Kutai Kartanegara
 a) Kondisi Perizinan

Dalam aspek perizinan pada RT 26 dan RT 29 masih sangat kurang, karena yang seharusnya semua bangunan memiliki terkait perizinan, baik dari segi izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah maupun izin mendirikan bangunan, namun bisa diamati di tabel 4.8 masih banyak bangunan yang tidak memiliki perizinan berdasarkan standar yang seharusnya.

Tabel 2. Kondisi RT 26 dan 29 Berdasarkan Indikator Perizinan

Variabel	Jumlah Bangunan RT 26 (unit)			Persentase Tidak Tersedia (%)	Jumlah Bangunan RT 29 (unit)			Persentase Tidak Tersedia (%)
	Tersedia	Tidak Tersedia	Seharusnya Tersedia		Tersedia	Tidak Tersedia	Seharusnya Tersedia	
Izin lokasi	1	10	11	91	3	10	13	77
Izin penggunaan pemanfaatan tanah	14	51	65	78	11	25	36	69
IMB (Izin mendirikan bangunan)	9	29	65	86	7	29	36	81

Sumber : Analisa Penulis, 2024

Dari tabel di atas maka didapatkan hasil untuk untuk aspek perizinan memiliki persentase tingkat indikasi kekumuhan tinggi yaitu pada range 76% - 100% bangunan yang tidak memiliki perizinan, namun dari tiga jenis perizinan yang ada izin penggunaan pemanfaatan tanah pada RT 26 memiliki persentase sedang yaitu sebesar 69%.

b) Standar Teknis dan Kelaikan Fungsi

Pada langkah perencanaan serta pembangunan tentu saja perlu dilakukannya pemenuhan standar teknis yang kemudian ditampilkan lebih lanjut dari pemenuhan standar teknis tersebut pada RT 26 dan RT 29. Kelaikan fungsi merupakan tahap pemeriksaan pada tahap pemanfaatan yang dimana dilihat bahwa sarana juga prasarana yang ada dapat berfungsi/tidak dan sarana prasarana yang ada dalam keadaan yang baik atau tidak.

1) Kondisi Bangunan Gedung

Pada aspek bangunan gedung bisa diamati kepadatan bangunan yang ada pada RT 26 dan RT 29 masuk ke dalam kategori kepadatan sedang seperti yang bisa diamati di tabel 4.5 RT 26 memiliki kepadatan bangunan sebesar 44,22 bangunan/ha dan pada RT 29 memiliki kepadatan bangunan sebesar 46,76 bangunan/ha.

Tabel 3. Perbandingan Kondisi Eksisting dan Standar

Kriteria	Jumlah	Berdasarkan	Persentase	Jumlah	Berdasarkan	Persentase
	Bangunan RT 26 (unit)	Standar (unit)		Bangunan RT 29 (unit)	Standar (unit)	
Permanen	9	65	14%	7	36	19%
Semi Permanen	56	0	86%	29	0	81%
Total	65	65	100%	36	36	100%

Sumber : Analisa Penulis, 2024

Kondisi pada bangunan gedung dari segi kelaikan fungsinya itu sendiri, pada RT 26 dan RT 29 mayoritas memiliki kriteria semi permanen seperti yang bisa diamati di tabel 4.9 di RT 26 sebanyak 86% yang mempunyai kriteria bangunan semi permanen serta pada RT 29 sebanyak 81% yang memiliki kriteria bangunan semi permanen, sehingga untuk kondisi bangunan gedung memiliki persentase tingkat indikasi kekumuhan pada range tinggi yaitu 76% - 100% karena memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan bangunan yang memiliki kriteria permanen.

2) Kondisi Jalan Lingkungan

Dari kriteria cakupan jalan lingkungan untuk RT 26 dan RT 29 sudah terlayani secara keseluruhan oleh prasarana jalan lingkungan yang menghubungkan antar wilayah dengan total panjang keseluruhan jalan lingkungan yang ada di RT 26 dan RT 29 yaitu 705 meter, sehingga persentase yang didapatkan untuk tidak terpenuhinya cakupan jalan lingkungan yaitu 0%.

Kemudian untuk jalan lingkungan dari segi kualitas permukaan jalan lingkungan pada RT 26 dan RT 29 memiliki jalan sepanjang 705 meter dengan kualitas jalan lingkungan yang baik dan menggunakan perkerasan aspal dan juga beton dan tidak adanya kerusakan jalan, sehingga didapatkan persentase untuk kualitas jalan lingkungan yang tidak baik sebesar 0%.

3) Kondisi Penyediaan Air Minum

Ketersediaan akses aman air minum pada RT 26 dan RT 29 sudah terpenuhi untuk keseluruhan kartu keluarga, yaitu sebanyak 83 KK untuk RT 26 dan 43 KK untuk RT 29, karena sudah terpenuhinya akses penyediaan aman air minum pada RT 26 dan RT 29 sehingga didapatkan persentase untuk KK yang tidak terpenuhi ama air minum yaitu sebesar 0%.

Selanjutnya pada kriteria terpenuhinya kebutuhan air minum berdasarkan jumlah kartu keluarga yaitu kebutuhan air minum minimal 60 liter/hari pada RT 26 dan RT 29 sudah terpenuhi seluruh kartu keluarga, sehingga didapatkan hasil persentase sebesar 0% untuk yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum.

4) Kondisi Drainase Lingkungan

Ketersediaan drainase lingkungan pada permukiman di RT 26 yaitu sebesar 285 meter dan RT 29 yaitu sebesar 149 meter panjangnya dan untuk ketidakterediaan drainase pada kawasan permukiman tersebut pada RT 26 sebesar 280 meter dan RT 29 sebesar 88 meter panjangnya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Perbandingan Kondisi Eksisting dan Standar

RT	Panjang Drainase (meter)			
	Tersedia	Tidak Tersedia	Seharusnya Tersedia	Persentase Tidak Tersedia (%)
26	285	280	565	50
29	149	88	237	37

Sumber : Analisa Penulis, 2024

Sehingga dengan data yang ada pada tabel di atas maka didapatkan persentase hasil analisis sebesar 50% tidak tersedia drainase lingkungan pada RT 26 dan sebesar 37% dan nilai tersebut berada pada range sedang yaitu diantara 51% - 75% untuk RT 26 dan range rendah untuk RT 29 yaitu berada diantara 25% - 50%.

Drainase lingkungan pada RT 26 dan RT 29 dengan panjang 285 meter dan 149 meter dilihat berdasarkan kondisi dan keadaannya yaitu memiliki kondisi yang baik karena menggunakan perkerasan jenis beton dan tidak ada drainase lingkungan yang mempunyai situasi tidak baik/pada kondisi rusak, sehingga didapatkan hasil analisis konstruksi drainase yang rusak sebesar 0%.

5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah yang ada pada RT 26 dan RT 29 yaitu dengan menggunakan sistem pengelolaan air limbah dengan memiliki kakus/kloset yang terhubung langsung dengan tengki septik dan dikelola secara

individual/domestik sebanyak 57 bangunan pada RT 26 telah mempunyai sistem pengelolaan air limbah dan sebanyak 29 bangunan pada RT 29 yang juga memiliki sistem pengelolaan air limbah.

Tabel 5. Kondisi Eksisting dan Standar

Kriteria	Jumlah Bangunan RT 26 (unit)	Berdasarkan Standar	Persentase	Jumlah Bangunan RT 29 (unit)	Berdasarkan Standar	Persentase
Menggunakan tengki septik	57	65	88%	29	36	81%
Tidak menggunakan tengki septik	8	0	12%	7	0	19%
Total	65	65	100%	36	36	100%

Sumber : Analisa Penulis, 2024

Sehingga berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil analisis untuk bangunan yang kakus/klosetnya tidak terhubung dengan tengki septik sebesar 12% pada RT 26 dan 19% pada RT 29.

6) Kondisi Persampahan

Prasarana dan sarana persampahan yang ada pada RT 26 dan RT 29 sudah memenuhi untuk kebutuhan RT 26 dan RT 29, yaitu tersedianya pembuangan sampah (tong sampah) sebanyak 11 unit untuk RT 26 dan sebanyak 6 unit untuk RT 29 yang tersedia di depan masing-masing rumah masyarakat untuk di Jalan Danau Uwis dan Jalan Kartini, namun untuk masyarakat yang bertempat tinggal pada Gang Anugrah, Gang Rizki dan Gang Hidayah berpusat di depan masing-masing gang karena akses jalan yang tidak memadai untuk truk pengangkut sampah masuk, sehingga didapatkan hasil analisis sebesar 0% karena sudah terpenuhinya persampahan yang ada di RT 26 dan RT 29.

Kemudian untuk kondisi tong sampah itu sendiri, khususnya yang berada di depan Gang Hidayah dan Gang Rizki memiliki keadaan yang tidak baik, karena ukurannya yang kurang besar sehingga masyarakat meletakkan sampah di sekitar tong sampah saja karena tidak ada ruang lagi.

7) Kondisi Proteksi Kebakaran

Pada aspek proteksi kebakaran dilihat ketersediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak terpenuhi karena rumah pada RT 26 dengan jumlah 65 bangunan dan pada RT 29 dengan jumlah 36 bangunan tidak memiliki sarana proteksi kebakaran seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Selain daripada itu terdapat prasarana yang tidak memadai seperti jalan lingkungan yang ada pada Gang Hidayah dan Gang Rizki dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Kondisi Prasarana Proteksi Kebakaran

RT	Nama Jalan	Panjang Jalan (meter)	Lebar Jalan (meter)	Ketidakterersediaan APAR (bangunan)	Persentase Ketidakterersediaan APAR
26	Gang Rizki	170	1,5	65	100%
29	Gang Hidayah	88	1	36	100%

Sumber : Analisa Penulis, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa kedua jalan lingkungan tersebut tidak memadai untuk masuk dan keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, serta hasil analisis menunjukkan bahwa 100% ketidakterersediaan APAR pada RT 26 dan RT 29. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait evaluasi tingkat indikasi kekumuhan yang terjadi pada RT 26 dan RT 29 dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 7. Tingkat Indikasi Kekumuhan RT 26

Aspek	Kriteria	Numerik	Satuan	Hasil Analisis (%)	Nilai
1.Kondisi Perizinan	a. Ketidakterersediaan izin lokasi	10	Unit	91%	5
	b. Ketidakterersediaan izin penggunaan pemanfaatan tanah	14	Unit	78%	5

Aspek	Kriteria	Numerik	Satuan	Hasil Analisis (%)	Nilai
	c. Ketidakterersediaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	9	Unit	86%	5
2. Kondisi Bangunan Gedung	a. Semi Permanen	56	Unit	86%	5
3. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Tidak terpenuhi cakupan jalan lingkungan	0	Meter	0%	0
	b. Kualitas jalan lingkungan yang buruk	0	Meter	0%	0
4. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Tidak memiliki akses Air Minum	0	Unit	0%	0
	b. Tidak terpenuhi Air Minum per individu	0	Jiwa	0%	0
5. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakterersediaan Drainase	280	Meter	50%	1
	b. Kondisi Drainase Rusak	0	Meter	0%	0
6. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Tidak Menggunakan tangki septik	8	Unit	12%	0
7. Kondisi Persampahan	a. Ketidakterersediaan Pembuangan Sampah	0	Unit	0%	0
8. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterersediaan APAR	65	Unit	100%	5

Sumber : Analisa Penulis, 2024

Berdasarkan hasil analisis di atas maka didapatkan nilai tingkat kekumuhan pada RT 26 sebesar 26 sehingga RT 26 merupakan permukiman yang termasuk dalam kategori kumuh ringan.

Tabel 8. Tingkat Indikasi Kekumuhan RT 29

Aspek	Kriteria	Numerik	Satuan	Hasil Analisis (%)	Nilai
1. Kondisi Perizinan	a. Ketidakterersediaan izin lokasi	10	Unit	77%	5
	b. Ketidakterersediaan izin penggunaan pemanfaatan tanah	25	Unit	69%	3
	c. Ketidakterersediaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	29	Unit	81%	5
2. Kondisi Bangunan Gedung	a. Semi Permanen	29	Unit	81%	5
3. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Tidak terpenuhi cakupan jalan lingkungan	0	Meter	0%	0
	b. Kualitas jalan lingkungan yang buruk	0	Meter	0%	0
4. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Tidak memiliki akses Air Minum	0	Unit	0%	0
	b. Tidak terpenuhi Air Minum per individu	0	Jiwa	0%	0

Aspek	Kriteria	Numerik	Satuan	Hasil Analisis (%)	Nilai
5. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakterediaan Drainase	88	Meter	37%	1
	b. Kondisi Drainase Rusak	0	Meter	0%	0
6. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Tidak Menggunakan tangki septik	7	Unit	19%	0
7. Kondisi Persampahan	a. Ketidakterediaan Pembuangan Sampah	0	Unit	0%	0
8. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan APAR	36	Unit	100%	5

Sumber : Analisa Penulis, 2024

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan pada tabel di atas maka nilai tingkat kekumuhan pada RT 29 sebesar 24 yang kemudian dapat ditentukan kategorinya, yaitu pada RT 29 merupakan permukiman yang termasuk dalam kategori kumuh ringan. Sehingga dengan hasil analisis kedua RT tersebut didapatkan bahwa kedua RT tersebut masuk dalam kategori kumuh ringan dan mayoritas nilai tertinggi untuk ketidakterediaan yaitu pada aspek perizinan dan aspek proteksi kebakaran.

D. Kesimpulan

Terdapat 13 kriteria dari 8 aspek penilaian yang digunakan untuk melakukan evaluasi tingkat indikasi kekumuhan pada Kelurahan Loa Ipuh, dimana pada RT.26 Kelurahan Loa Ipuh memiliki sebanyak 7 kriteria dengan nilai 0, 1 kriteria dengan nilai 1 dan 5 kriteria dengan nilai 5. Sedangkan pada RT.29 Kelurahan Loa Ipuh sebanyak 7 kriteria dengan nilai 0, 1 kriteria dengan nilai 1, 1 kriteria dengan nilai 3 dan 4 kriteria dengan nilai 5.

Kekurangan yang ada pada penelitian yang dilakukan di Kelurahan Loa Ipuh yaitu hanya memfokuskan pada wilayah RT.26 dan RT.29 dimana wilayah ini merupakan wilayah yang berpotensi menjadi permukiman kumuh baru. Namun penelitian yang dilakukan pada wilayah kecil seperti ini memiliki kekurangan pada proses pengambilan data karena tidak semua data yang dibutuhkan dapat tersedia sehingga menghambat proses analisis data pada penelitian ini.

E. Daftar Pustaka/Referensi

- Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. (2019). Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 454/SK-BUP/HK/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.
- Muvidayanti, S., Sriyono. (2019). Karakteristik dan Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
- Sari, Agistya R., Muhammad Agung R. (2021). Studi Literatur : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan. Jurnal Kajian Ruang Vol. 1 No. 2.
- Patrisia, Novliza Eka. (2017). Penataan Perumahan Kumuh Kota Berbasis Kawasan. Jurnal Professional FIS UNIVED. Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Wardhani, Veronika A. E., Roychansyah M. Sani, dan Sarwadi, Ahmad. (2018). Hubungan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Tingkat Kesehatan Masyarakat di Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Winongo, Kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.